

**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
2019**

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Jenis Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7
1. Informasi Profil						
a	Visi dan Misi	Subbag Program	2019	Soft copy & hard copy	Selama berlaku	Website Distanbun & Running Text di lobby
b	Rencana Strategis (RENSTRA)	Subbag Program	2019	Soft copy & hard copy	5 tahun	Website Distanbun
c	Tupoksi Badan Publik	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy	Selama berlaku	Website Distanbun
d	Tupoksi Satuan Kerja	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy	Selama berlaku	Website Distanbun
e	Profil Singkat Kepala Badan	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy	Selama berlaku	Website Distanbun
f	Alamat lengkap	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy	Selama berlaku	Website Distanbun
g	Data Pegawai/Sumber Daya Manusia	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy	Selama berlaku	Website Distanbun
h	LHKPN/LHKASN	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy	Selama berlaku	Website Distanbun
2. Ringkasan Program dan Kegiatan						
a	Nama Program dan Kegiatan	Subbag Program	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun
b	Penanggungjawab dan Pelaksana Program	Subbag Program	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun
c	Target Capaian Program dan Kegiatan	Subbag Program	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun
d	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Subbag Program	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun
e	Nilai Anggaran	Subbag Program	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun
3. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan						
a	Ringkasan Informasi Kinerja	Subbag Program	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun
b	LKJIP	Subbag Program	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun

c	Laporan Layanan Informasi Publik	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun
d	Regulasi	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy	Selama berlaku	Website Distanbun
e	Pengadaan Barang dan Jasa	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website LPSE
f	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website LPSE
g	Kerangka Acuan Kerja	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website LPSE
h	Penerimaan Pegawai	Subbag Umum dan Kepegawaian	Tentative	Soft copy & hard copy	1 tahun	simpegonline

4. Ringkasan Laporan Keuangan

a	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	Subbag Program	2018-2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun
b	Neraca	Subbag Keuangan	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun
c	RKA-KL/DPA	Subbag Program	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun
d	Dasar Aset dan Investasi	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun

5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

a	Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diterima	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy		Website Distanbun
b	Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy		Website Distanbun
c	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya dan Yang Ditolak	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy		Website Distanbun
d	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Subbag Umum dan Kepegawaian	2019	Soft copy & hard copy		Website Distanbun

B. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Jenis Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	Daftar Rancangan dan Tahap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan/Kebijakan Yang Sedang Dalam Proses Pembuatan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun
2	Daftar Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan/Kebijakan Yang Telah Disahkan/Ditetapkan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Soft copy & hard copy	> 1 tahun	
3	Informasi Tentang Organisasi dan Administrasi Kepegawaian	Subbag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Soft copy & hard copy	> 1 tahun	

4	Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik Sesuai Ketentuan UU KIP	Subag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Soft copy & hard copy	> 1 tahun	
5	Informasi tentang Tata Cara Pengadaan Penyalahgunaan Wewenang Berupa Alur dan Pelayanan Pengadaan Yang Diatur Tersendiri Oleh Badan Publik	Subag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Soft copy & hard copy	> 1 tahun	
6	Agenda Kerja Dinas	Subag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada kegiatan	Soft copy & hard copy	> 1 tahun	
7	Rencana Strategis	Subag Program	Setiap awal periode	Soft copy & hard copy	> 1 tahun	Website Distanbun
8	Rencana Kerja Tahunan	Subag Program	Setiap awal tahun	Soft copy & hard copy	> 1 tahun	
9	Data Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Subag Program	setiap tahun	Soft copy & hard copy	> 1 tahun	Website Distanbun
10	Statistik Komoditas Pertanian dan Perkebunan	Subag Program	setiap tahun	Soft copy & hard copy	> 1 tahun	Website Distanbun
11	Data Distribusi Pupuk Jawa Tengah	Bidang Sarana Prasarana	setiap tahun	Soft copy & hard copy	> 1 tahun	
12	Data Keadaan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	Balai Perlindungan TPH	setiap musim tanam	Soft copy & hard copy	1 tahun	
13	Data benih Tanaman Pangan / Hortikultura	Balai Benih TPH	setiap musim tanam	Soft copy & hard copy	1 tahun	
14	Data Harga Komoditas Pertanian dan Perkebunan	Bidang Usaha Pertanian	setiap hari, bulan, thn	Soft copy & hard copy	1 tahun	Website Distanbun
15	Data Lahan Pertanian yang Terkena Dampak Bencana	Bidang Sarana Prasarana/BPTPH	tentive	Soft copy & hard copy	1 tahun	
16	Pelayanan Sertifikasi Benih	Balai Sertifikasi & Pengawasan Benih	setiap tahun	Soft copy & hard copy	1 tahun	
17	Pelayanan Pembelian Benih	Balai Benih TPH	setiap tahun	Soft copy & hard copy	1 tahun	
18	Registrasi Kebun / Lahan Usaha	Bidang Hortikultura	tentive	Soft copy & hard copy	1 tahun	
19	Klinik Tanaman	Balai Perlindungan TPH	tentive	Soft copy & hard copy	1 tahun	
21	Penyewaan Fasilitas Dinas Untuk Umum	Subag Umum dan Kepegawaian	tentive	Soft copy & hard copy	1 tahun	
22	Konsultasi / Kontak Kami / Layanan Informasi	Subag Umum dan Kepegawaian	tentive	Soft copy & hard copy	1 tahun	

II. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Pengecualian Informasi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Mantfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
1	Identitas PNS yang mengajukan jijn	1. UUD Negara RI Th 1945 Pasal 28 A s/d 28 H	Melindungi hak asasi manusia (HAM)	Tidak Terbatas	1. Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat

	perkawinan/perceraian	2. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	berdasarkan konstitusi		2. Melanggar HAM	rahasia
		1. UUD Negara RI Th 1945 Pasal 28 A s/d 28 H	Melindungi hak asasi manusia (HAM)		1. Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi
2	Proses Nilai SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) PNS	2. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. PP No. 10 Th 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS	berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	2. Melanggar HAM	PNS yang bersifat rahasia
		1. UUD Negara RI Th 1945 Pasal 28 A s/d 28 H	Melindungi hak asasi manusia (HAM)		1. Mengungkap data pribadi PNS	1. Melindungi data pribadi PNS yang bersifat
3	Data Rekam Medis PNS	2. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis (Pasal 10)	berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	2. Melanggar HAM	2. Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS
		1. UUD Negara RI Th 1945 Pasal 28 A s/d 28 H	Melindungi hak asasi manusia (HAM)		3. Dapat Merugian PNS	
		2. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS		Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum
4	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	3. PP No. 100 Th 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo PP No. 13 h 2002 Tentang Perubahan Atas PP No. 100 Th 2000	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Tertbatas sampai dengan pelantikan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila terbuka akan menimbulkan penilaian	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
		1. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa			
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	2. Keppres No. 80 Th2003 beserta perubahannya	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat	Tertbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang/Jasa selesai	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian
		1. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Menjamin, melindungi kerahasiaan data	Tidak Terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Menjaga dan mengamankan perangkat serta data
6	Dokumen Penawaran Kontrak	2. Perpres No. 54 Th 2010 Tentang Pengadaan Baarang/Jasa Pemerintah	Menjamin, melindungi kerahasiaan data	Tidak Terbatas	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses
		UU No. 11 Th 2008 Ttg Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37)	Menjamin, melindungi kerahasiaan data	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
7	Lokasi Server	UU No. 11 Th 2008 Ttg Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menjamin, melindungi kerahasiaan data	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
8	Internet Protocol/IP Address Private	UU No. 11 Th 2008 Ttg Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menjamin, melindungi kerahasiaan data	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
9	Bandwidth Management	UU No. 11 Th 2008 Ttg Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
10	Kode akses elektronik	UU No. 11 Th 2008 Ttg Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
		1. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database
11	Sistem management data base	UU No. 11 Th 2008 Ttg Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database

12	a. Laporan hasil pemeriksaan reguler naskah hasil pemeriksaan (NHP)	UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf f	NHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan	Sampai menjadi laporan hasil pemeriksaan	Mengambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
13	b. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	PP No. 60 Th 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	LHP belum bersifat final / naskah hasil pemeriksaan	Sampai menjadi laporan hasil pemeriksaan		
14	c. Proses Laporan Keuangan	1. PP No 79 Th 2005 Tentang Pedoman Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Mengan No PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah 3. Peraturan Mengan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah 4. Permendagri No. 28 Th 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan Huruf	Jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan	Sampai menjadi laporan keuangan		

III. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Pengecualian Informasi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat jika Info Dibuka	Manfaat jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Pengujian Mutu Hasil Pertanian	1. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b 2. PP No 38 Th 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten 1. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b 2. PP No 38 Th 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Melindungi kompetensi	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelernbagaan sertifikasi
2	Proses uji laboratorium	1. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b 2. UU No. 8 Th 1999 Tentang Perindungan Konsumen 3. UU No. 69 Th 1999 Tentang Iklan dan Pelabelan 4. UU No. 18 Th 2012 Tentang Pangan	Melindungi informasi yang diperoleh	Sampai ada keputusan resmi/hasil uji resmi	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh
3	Proses uji mutu pangan di Produsen	1. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b 2. UU No. 8 Th 1999 Tentang Perindungan Konsumen 3. UU No. 69 Th 1999 Tentang Iklan dan Pelabelan 4. UU No. 18 Th 2012 Tentang Pangan	Melindungi ketentrman	Sampai ada keputusan resmi/hasil uji resmi	Menimbulkan keeresahan di masyarakat	Melindungi ketentrman masyarakat

IV. INFORMASI SERTA MERTA

PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tidak menyediakan Informasi Serta Merta Informasi serta merta biasanya memuat informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang dan sifatnya mendadak. Seperti informasi tentang peringatan dini tsunami, potensi pencemaran lingkungan yang mengancam seperti kebakaran, minyak mentah yang tumpah, atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dan yang berpotensi menimbulkan gejala/kerusakan.

PELABAT PENGETEK INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

